

# PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH BERBASIS SEKTOR UNGGULAN KASUS : KABUPATEN PASAMAN PASCA OTONOMI DAERAH

**Wenny Widya Wahyudi<sup>1</sup>, Dominic Savio Priyarsono<sup>2</sup>  
dan Amzul Rifin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan,  
Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

<sup>3</sup>Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor  
e-mail : <sup>1</sup> [wennyww4@gmail.com](mailto:wennyww4@gmail.com)

## ABSTRACT

*In the economic aspect, regional development planning is how to determine role of economic sector in achieving targeted growth followed by investment activity from government and private sector. Local government have limited resources and funding sources, thus the local government needs a development priority. The aims of this study are to determine the basic sector in Pasaman, to assess the budget performance of Pasaman Regency from 2004 to 2012, to analyze impact of local government budgets on the basic sector, and to determine the appropriate budget policies to increase basic sector performance. The data is analyzed with LQ (Location Quotient), SSA (Shift Share Analysis), descriptive analysis, and correlation analysis. The results showed that agriculture is a basic sector with high competitiveness than any other sector in Pasaman Regency and Pasaman Regency highly depends on the central government budget. Agriculture Gross Regional Domestic Product is highly correlated with regular budget and development budget. In order to boost performance of the agricultural sector, local government should manage its local budget strategy. The local government needs to increase the independence of the local budget as well as to manage its natural resources and human resources. The government also should increase the proportion of development spending, especially development budget in agricultural sector.*

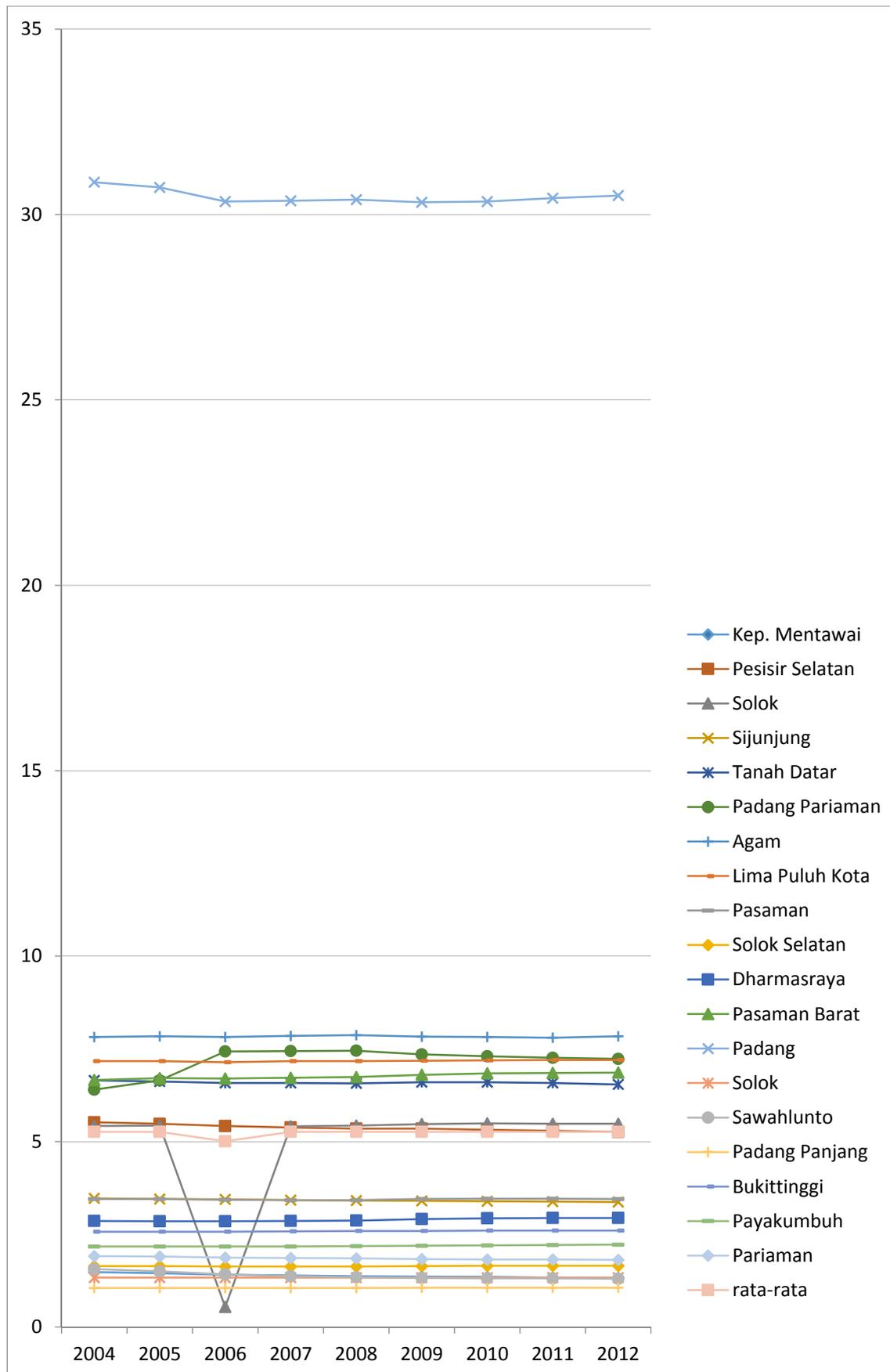
**Keywords:** basic sector, regional budget, Pasaman Regency

## PENDAHULUAN

Kabupaten Pasaman termasuk kedalam salah satu daerah otonom. Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten diantara 19 kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Barat. Persentase PDRB dari 12 kabupaten di provinsi Sumatera Barat berdasarkan atas harga konstan 2000 pada tahun 2012, Kabupaten Pasaman berada pada posisi ke 9, dibandingkan dengan 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman berada pada posisi ke 10.

Menurut Tarigan (2006), untuk mewujudkan pembangunan ekonomi baik pembangunan nasional maupun pembangunan

daerah salah satunya dapat dilihat dari segi pembangunan sektoral, dimana pendekatan pembangunan sektoral adalah pencapaian sasaran pembangunan suatu wilayah yang meliputi seluruh kegiatan dikelompokkan atas sektor-sektornya, yaitu sektor primer (sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian), kemudian sektor sekunder (sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan/konstruksi), selanjutnya sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor Jasa-jasa).



Gambar 1. Persentase PDRB Sumatera Barat tahun 2004-2012

Sumber : BPS Sumatera Barat 2004-2012

Perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari sumber daya alam dan faktor produksi yang dimilikinya dan besarnya PDRB atau perekonomian di suatu daerah atau kabupaten/kota terbentuk dari berbagai macam aktivitas atau kegiatan ekonomi yang timbul pada suatu daerah. Apabila dilihat dari distribusi persentase PDRB kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha berdasarkan atas dasar harga berlaku tahun 2012, distribusi persentase PDRB sektor pertanian Kabupaten Pasaman merupakan yang paling tertinggi di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 54,10 %. Tetapi secara nyata dapat dilihat pada Gambar 1 bahwa Kabupaten Pasaman masih berada dibawah garis rata-rata PDRB Provinsi Sumatera Barat.

Perekonomian Kabupaten Pasaman didominasi oleh sektor pertanian karena menurut data BPS (2004-2012), PDRB Kabu-

paten Pasaman menurut sektor/lapangan usaha atas dasar harga Konstan pasca otonomi daerah dari tahun 2004-2012 sektor pertanian mempunyai nilai PDRB yang paling besar apabila dibandingkan dengan nilai PDRB sektor/lapangan usaha secara keseluruhan, meskipun dari tahun 2010-2012 persentase PDRB Kabupaten Pasaman pada sektor pertanian selalu mengalami penurunan.

Sektor pertanian memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan regional dan nasional. Sektor pertanian bukan saja berperan terhadap ketahanan pangan wilayah nasional, namun juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Pasaman, dan juga merupakan penyedia lapangan pekerjaan bagi lebih dari 70% penduduk Kabupaten Pasaman pada tahun 2012 (Tabel. 2).

**Tabel 1. Persentase PDRB Kabupaten Pasaman Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004-2012**

Sektor/ Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	51,49	51,69	51,80	51,96	51,86	51,93	51,84	51,80	51,74
2. Pertambangan dan Penggalian	2,46	2,43	2,39	2,35	2,29	2,25	2,19	2,13	2,08
3. Industri Pengolahan	4,54	4,52	4,51	4,48	4,45	4,45	4,44	4,37	4,30
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35
5. Bangunan/Konstruksi	3,23	3,23	3,21	3,18	3,20	3,21	3,24	3,26	3,29
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	12,26	12,39	12,51	12,63	12,74	12,86	12,99	13,13	13,27
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,05	4,07	4,12	4,15	4,17	4,22	4,28	4,34	4,40
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,97	3,92	3,87	3,81	3,76	3,71	3,66	3,62	3,57
9. Jasa-jasa	17,64	17,41	17,24	17,09	17,17	17,02	17,01	17,00	17,00

Sumber : BPS Kabupaten Pasaman (Data diolah)

**Tabel 2. Persentase Angkatan Kerja Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012**

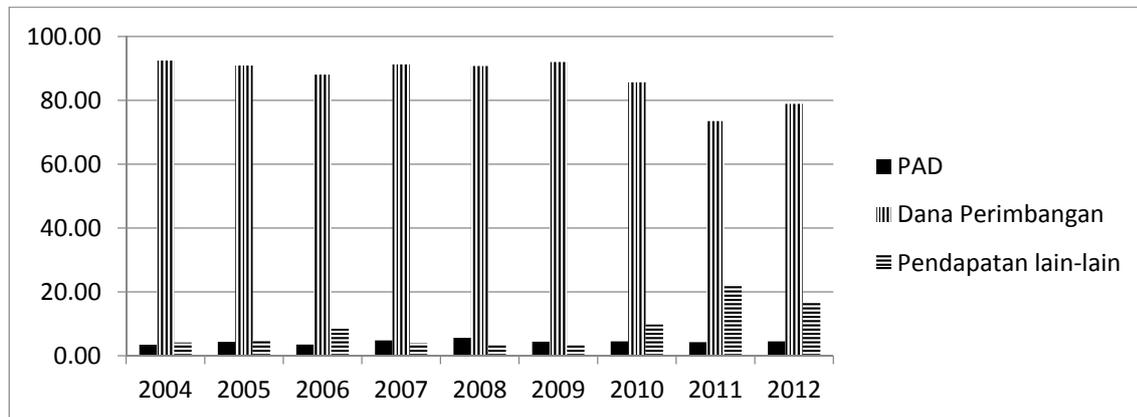
Sektor/Lapangan Usaha	Angkatan Kerja
1. Pertanian	76,97
2. Pertambangan dan Penggalian	0,46
3. Industri Pengolahan	2,93
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,01
5. Bangunan/Konstruksi	1,01
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	7,68
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2,04
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,37
9. Jasa-Jasa	6,29
10. Lainnya	2,19

Sumber : BPS Kabupaten Pasaman, 2012 (Data diolah)

Keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan menuntut pemerintah daerah melakukan prioritas pembangunan. Menurut Badan Pusat Statistik (2012), pendapatan daerah Kabupaten Pasaman dari tahun 2004-2012 selalu di atas 70% berasal dari dana perimbangan (Gambar 2), Pendapatan yang terbesar dari dana perimbangan yaitu berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Fungsi DAU adalah sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal, kebutuhan DAU pada setiap daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah dan potensi daerah (Darise 2009).

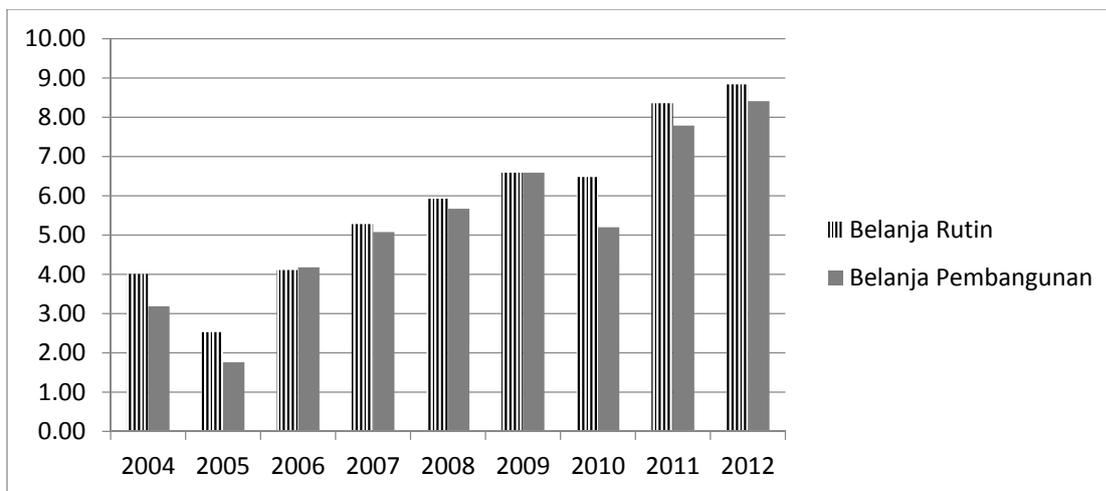
Dalam pembangunan di bidang ekonomi, pemerintah daerah dituntut jeli untuk meng-

alokasikan anggaran secara tepat. Penganggaran yang tepat akan membuat suatu wilayah mampu mengembangkan wilayahnya, tetapi jika penganggaran yang dilakukan di dominasi oleh belanja tertentu maka pembangunan suatu daerah tidak akan berjalan efektif. Pada tahun 2004-2012 secara keseluruhan dapat dilihat bahwa belanja rutin lebih tinggi daripada belanja pembangunan kecuali pada tahun 2006 dan 2009, dimana pada tahun 2006 belanja rutin sebesar 4,11 persen dan belanja pembangunan sebesar 4,18 persen dan pada tahun 2009 persentase untuk belanja rutin dan belanja pembangunan setara yaitu sebesar 6,59 persen (Gambar. 3).



**Gambar 2. Perkembangan Persentase Pendapatan Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2012**

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2012



**Gambar 3. Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2012**

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2012

Dalam hal belanja daerah, anggaran belanja rutin masih sangat mendominasi pengeluaran anggaran pada Kabupaten Pasaman dibandingkan dengan anggaran belanja pembangunan. Masalah ekonomi bagi masyarakat bukan hanya soal kelancaran alokasi tetapi juga soal distribusi, maka setiap bentuk dan arah alokasi belanja pemerintah tentu punya nilai tersendiri. Jika alokasi anggaran lebih banyak untuk anggaran belanja rutin birokrasi dan belanja para pejabat publik, maka aspek keadilannya menjadi kecil. Jika alokasi APBD untuk belanja pembangunan atau belanja investasi lebih besar, maka kepentingan publik lebih banyak yang terlayani.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman selama suatu periode tertentu tidak dapat terlepas dari perkembangan masing-masing sektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Pertanian merupakan sektor utama perekonomian di kabupaten Pasaman. Sektor pertanian memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam perekonomian nasional. Beberapa peran yang dimaksud adalah (1) Kontribusi terhadap PDB, (2) penyedia pangan dan pakan, (3) sumber devisa, (4) penyedia bahan baku industri dan sumber bio-energi, (5) penyerapan tenaga kerja, (6) pengentasan kemiskinan, dan (7) peningkatan pendapatan masyarakat (Departemen Pertanian, 2009).

Hirschman dalam Todaro (1989), menyatakan bahwa untuk negara (daerah) yang berkembang, pembangunan ekonomi tidak dilakukan secara serentak (*imbalanced growth*) namun dilakukan dengan menetapkan sektor unggulan, dimana sektor unggulan ini akan memberi implikasi terhadap sektor-sektor lainnya. Sedangkan menurut Miyarto et al. (1993), dalam pembangunan ekonomi sektoral, prioritas hendaknya diberikan kepada sektor-sektor yang mempunyai daya penyebaran dan derajat kepekaan tinggi.

Pembangunan di suatu wilayah seharusnya dilakukan pada sektor-sektor yang merupakan sektor unggulan. Sektor unggulan sebagai penggerak sektor lainnya, mem-

punyai keterkaitan yang sangat besar dengan sektor lainnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi daerah, perhatian dan fokus pemerintah kepada sektor unggulan akan memberikan dampak kepada sektor-sektor perekonomian lainnya secara simultan. Maka perencanaan dan penganggaran harus tepat dan sesuai pada sasaran demi mewujudkan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan tujuan pemerintah pembangunan itu sendiri untuk menyejahterakan masyarakatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang saling terkait satu sama lainnya dan merupakan satu kesatuan, sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran.

Proses perencanaan sampai dengan penganggaran yang baik pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Kinerja pembangunan daerah dapat tercapai apabila penganggaran telah sesuai dengan tujuan pembangunan daerah itu sendiri, antara lain menyejahterakan masyarakat, mengurangi ketergantungan fiskal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan berbagai macam keterbatasan sumber-sumber pendapatan untuk melaksanakan pembangunan, maka perlu dikembangkan suatu sistem anggaran yang mengarah pada sektor unggulan.

Masalah ekonomi bagi masyarakat bukan hanya soal kelancaran alokasi tetapi juga soal distribusi, setiap bentuk dan arah alokasi belanja pemerintah tentu punya nilai tersendiri. Jika alokasi anggaran lebih banyak untuk anggaran belanja rutin birokrasi dan belanja para pejabat publik, maka aspek keadilannya menjadi kecil. Jika alokasi APBD untuk belanja pembangunan atau belanja investasi lebih besar, maka kepentingan publik lebih banyak yang terlayani.

Kepentingan publik di sini bukan sekedar peningkatan pelayanan publik tetapi juga termasuk peningkatan kapasitas ekonomi

daerah secara keseluruhan. Berbeda dengan bentuk alokasi yang didominasi oleh belanja rutin, alokasi yang lebih besar kepada kebutuhan pembangunan lebih menjanjikan peningkatan nilai tambah bagi berbagai sektor perekonomian. Ketidaktepatan alokasi belanja pembangunan pada sektor-sektor perekonomian terutama pada sektor unggulan menyebabkan alokasi belanja yang telah dilakukan menjadi tidak efisien dan efektif yang pada akhirnya menimbulkan kemubaziran. Dengan alokasi belanja pembangunan yang tepat, baik jumlah maupun sektornya, akan memberikan efek yang positif bagi pemerintah daerah sehingga kinerja pembangunan daerah lebih meningkat.

## METODE

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pasaman. Data sekunder yang digunakan adalah beberapa data perekonomian regional Kabupaten Pasaman, seperti: PDRB Kabupaten Pasaman dan APBD Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang terdiri dari Analisis *Location Quotient* (LQ) untuk mengidentifikasi sektor potensial wilayah Kabupaten Pasaman, *Shift Share Analysis* (SSA) untuk menjelaskan kinerja sektoral pada suatu wilayah, analisis deskriptif dengan dua pendekatan yaitu dari sisi penerimaan dan dari sisi pengeluaran anggaran daerah untuk mengkaji kinerja keuangan daerah Kabupaten Pasaman, kemudian analisis korelasi yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan belanja daerah dengan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Pasaman, selanjutnya analisis deskriptif yang digunakan untuk merumuskan kebijakan anggaran daerah yang efektif dalam mendorong kinerja sektor unggulan wilayah Kabupaten Pasaman.

Metode analisis yang digunakan yaitu terdiri dari Analisis *Location Quotient* (LQ) untuk mengidentifikasi sektor potensial wilayah Kabupaten Pasaman, *Shift Share Analysis* (SSA) untuk menjelaskan kinerja sektoral pada suatu wilayah, dan selanjutnya

analisis korelasi yaitu untuk menganalisis anggaran belanja daerah yang berpengaruh dalam mendorong kinerja sektor unggulan wilayah Kabupaten Pasaman.

## LOCATION QUOTIENT (LQ)

Metode LQ digunakan untuk mengetahui potensi dari suatu aktivitas ekonomi yang merupakan indikasi sektor basis dan non basis, dengan cara membandingkan antara kemampuan sektor yang sama pada wilayah yang lebih luas. Sektor basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hasil produksinya dapat melayani pasar baik di dalam maupun di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya mampu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Persamaan LQ menurut Blakely (1994) dalam Panuju DR dan Rustiadi E (2012), sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{X_i/X_t}{Y_i/Y_t}$$

dimana:

$X_i$  = PDRB Lapangan Usaha I disuatu daerah (kabupaten/kota)

$X_t$  = PDRB total suatu daerah (kabupaten/kota)

$Y_i$  = PDRB Lapangan Usaha i secara regional (Provinsi)

$Y_t$  = PDRB total secara regional

Kriteria LQ

$LQ > 1$ , artinya sektor tersebut menjadi sektor basis atau menjadi sumber pertumbuhan, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi dapat juga diekspor ke luar wilayah.

$LQ = 1$ , artinya sektor tersebut tergolong non basis. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.

LQ < 1, artinya sektor tersebut juga tergolong non basis. Produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar.

### SHIFT SHARE ANALYSIS (SSA)

Shift Share Analysis merupakan salah satu dari sekian banyak teknik analisis untuk memahami pergeseran struktur aktifitas di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan suatu referensi (dengan cakupan wilayah yang lebih luas) dalam dua titik waktu. Pemahaman struktur aktifitas dari hasil analisis Shift-Share menjelaskan kemampuan berkompetisi (*competitiveness*) aktifitas tertentu disuatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktivitas dalam cakupan lebih luas. Hasil analisis Shift-Share mampu memberikan gambaran sebab-sebab terjadinya pertumbuhan suatu aktifitas di suatu wilayah. sebab-sebab yang dimaksud dibagi menjadi tiga bagian yaitu: sebab yang berasal dari dinamika lokal (sub-wilayah), sebab dari dinamika aktifitas/sektor (total wilayah) dan sebab dari dinamika wilayah secara umum (laju pertumbuhan agregat). Dengan demikian dari hasil analisis Shift-Share akan diperoleh gambaran kinerja aktifitas suatu wilayah yang dapat dijelaskan dari 3 komponen, yaitu:

1. Komponen Laju Pertumbuhan agregat (komponen *Agregat*). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang menunjukkan dinamika total wilayah.
2. Komponen Pergeseran Proporsional (Komponen *Proporsional Shift*). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total aktifitas tertentu secara relatif, dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah yang menunjukkan dinamika sektoral/aktifitas total dalam wilayah.
3. Komponen Pergeseran Diferensial (Komponen *Differential Shift*). Ukuran ini menjelaskan bagaimana tingkat kompetisi (*competitiveness*) suatu aktifitas tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total

sektor/aktifitas tersebut dalam wilayah. Komponen ini menggambarkan dinamika (keunggulan/ketidakkunggulan) suatu sektor/aktifitas tertentu di sub-wilayah tertentu terhadap aktifitas tersebut di sub-wilayah lain (Rustiadi 2011).

Persamaan analisis Shift-Share ini adalah sebagai berikut:

$$SSA = a + b + c$$

$$SSA = \left( \frac{X_{(t1)}}{X_{(t0)}} - 1 \right) + \left( \frac{X_{i(t1)}}{X_{i(t0)}} - \frac{X_{(t1)}}{X_{(t0)}} \right) + \left( \frac{X_{ij(t1)}}{X_{ji(t0)}} - \frac{X_{i(t1)}}{X_{i(t0)}} \right)$$

dimana:

- a = komponen *agregat/share*
- b = komponen *proportional shift*
- c = komponen *differential shift*
- X.. = Jumlah PDRB total seluruh sektor dalam total wilayah
- X.i = Jumlah PDRB sektor tertentu dalam total wilayah
- Xij = jumlah PDRB sektor tertentu dalam unit wilayah tertentu
- ti = nilai tahun ahkir
- t0 = nilai tahun awal

### ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH

Kinerja keuangan daerah dapat dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan (Suparmoko, 2000).

#### 1. Sisi Penerimaan

Ketersediaan fiskal dapat ditunjukkan dari tiga sumber yaitu:

- a. Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah menunjukkan kemandirian fiskal dari suatu daerah, yang dapat diformulasikan :

$$DDF = \frac{PAD}{TPA} \times 100\%$$

Keterangan :

- DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
- PAD = Penerimaan Asli Daerah
- TPD = Total Penerimaan Daerah
- = PAD + BHPBP + SB + Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- b. Rasio dana bagi hasil terhadap total penerimaan daerah menunjukkan besarnya potensi daerah terhadap sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Hubungan ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$DPS = \frac{BHPBP}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

DPS = Derajat Potensi SDA dan SDM

BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

- c. Rasio transfer dari pusat terhadap total penerimaan daerah menunjukkan besarnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan atau besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Hubungan ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$DKP = \frac{SB}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

DKP = Derajat Ketergantungan Daerah Terhadap Pemerintah Pusat

SB = Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus

## 2. Sisi Pengeluaran

- a. Pengeluaran rutin

$$DKR = \frac{BR}{TKD} \times 100\%$$

Keterangan :

DKR = Derajat Belanja Rutin Daerah

BR = Belanj Rutin (Juta Rupiah)

TKD = Total Pengeluaran daerah = Belanja Rutin + Belanja Pembangunan

- b. Pengeluaran Pembangunan

$$DKP = \frac{BP}{TKD} \times 100\%$$

Keterangan :

DKP = Derajat Belanja Pembangunan Daerah

BP = Belanja Pembangunan (Juta Rupiah)

## DERAJAT KEMANDIRIAN DAERAH

$$DK = \frac{PAD}{TKD}$$

Keterangan :

DK = Derajat Kemandirian Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah)

TKD = Total Pengeluaran Daerah (juta Rupiah)

## ANALISIS KORELASI

Data yang dianalisis dalam analisis korelasi yaitu: Peubah Bebas (X) terdiri dari : belanja rutin harga konstan 2004 dan belanja pembangunan harga konstan 2004 dari tahun 2004-2012. Sedangkan peubah tak bebas (Y) yang digunakan adalah PDRB sektor pertanian harga konstan 2004 dari tahun 2004-2012. Data yang digunakan dalam analisis korelasi sebelumnya telah dihilangkan pengaruh inflasi dengan cara menjadikan data tersebut menjadi konstan menggunakan tahun 2004 (Yuspiar I, 2014).

$$\text{Output}_{k,t} = \text{Output}_{b,t} / (\text{IH}_t/100)$$

Bilangan Indeks merupakan bilangan yang menjelaskan perubahan relatif terhadap suatu harga, kuantitas dan nilai, yang dibandingkan dengan suatu periode acuan (Lind DA,2008).

$$\text{IH}_t = \text{Output}_{b,t} / \text{Output}_{b,k}$$

Keterangan:

Output<sub>k,t</sub> = Output Harga Konstan Tahun Tertentu

Output<sub>b,t</sub> = Output Harga Berlaku Tahun Tertentu

Output<sub>b,k</sub> = Output Harga Berlaku Tahun Acuan

IH<sub>t</sub> = Indeks Harga

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### SEKTOR UNGGULAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN

Sektor yang dikategorikan sebagai sektor unggulan dari keseluruhan sektor yang ada di Kabupaten Pasaman yaitu sektor pertanian pada periode 2004-2012, dan sektor jasa-jasa

pada periode 2004-2010. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien LQ yang dimiliki oleh sektor pertanian lebih besar dari 1 pada periode 2004-2012. Sedangkan sektor jasa-jasa juga merupakan sektor unggulan pada periode 2004-2010, hal ini ditunjukkan dengan LQ sektor jasa-jasa lebih besar dari 1 pada periode tersebut, tetapi pada periode 2011-2012 LQ sektor jasa-jasa lebih kecil dari 1. Sedangkan ketujuh sektor lainnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dari periode 2004-2012 menunjukkan LQ lebih kecil dari 1 sehingga ketujuh sektor tersebut tidak termasuk kedalam sektor unggulan Kabupaten Pasaman.

Sektor pertanian adalah penyumbang terbesar dari seluruh sektor-sektor yang ada di Kabupaten Pasaman. Meningkatnya besaran nilai LQ pada sektor pertanian tidak terlepas dari sumber daya alam yang subur dengan masyarakat yang mampu memanfaatkan kekayaan alam yang ada dengan sebaik-sebaiknya. Disamping itu, Kabupaten Pasaman merupakan wilayah yang mempunyai potensi yang besar dalam mengembangkan sektor pertanian, karena didukung oleh luas lahan pertanian Kabupaten Pasaman yang berada pada urutan ketiga di Sumatera Barat, yaitu sebesar 9,37% dari luas lahan

pertanian keseluruhan di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, apabila pemerintah dapat mempertahankan perhatiannya terhadap sektor pertanian maka selanjutnya akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pasaman (BPS 2012).

Tumbuh dan berkembangnya aktivitas perekonomian merupakan suatu kondisi yang diharapkan dari proses pembangunan. Tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah akan diiringi dengan bergesernya struktur perekonomian pada suatu wilayah. Untuk mengetahui struktur aktifitas dan mengetahui kemampuan berkompetisi suatu sektor maka perlu dilakukan analisis shift share, hasil analisis shift share dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan hasil analisis *shift share* dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan sektor pertanian dengan sektor listrik dan air bersih mempunyai tingkat *Competitiveness* lebih besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya yang ada di Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu pengembangan kedua sektor tersebut di Kabupaten Pasaman akan cenderung lebih menguntungkan dibandingkan dengan sektor lainnya. Tingkat pertumbuhan sektor pertanian 0,114 juga lebih besar dibandingkan tingkat pertumbuhan sektor pertanian secara umum di Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 3. Nilai LQ Sektor Perekonomian Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2012**

Sektor/ Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	2,08	2,07	2,03	2,13	2,15	2,16	2,22	2,27	2,30
2. Pertambangan	0,75	0,74	0,09	0,75	0,74	0,73	0,71	0,70	0,70
3. Industri Pengolahan	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36
4. Listrik dan Air Bersih	0,29	0,30	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32
5. Bangunan	0,63	0,65	0,62	0,64	0,64	0,65	0,61	0,60	0,60
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,65	0,68	0,66	0,69	0,69	0,70	0,73	0,73	0,73
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,33	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,81	0,78	0,73	0,74	0,73	0,71	0,71	0,71	0,70
9. Jasa-jasa	1,07	1,06	1,03	1,05	1,06	1,04	1,01	0,99	0,99

Sumber : BPS Sumatera Barat 2004-2012

Tabel 4. Hasil Analisis *Shift Share* Tahun 2007 dan 2012

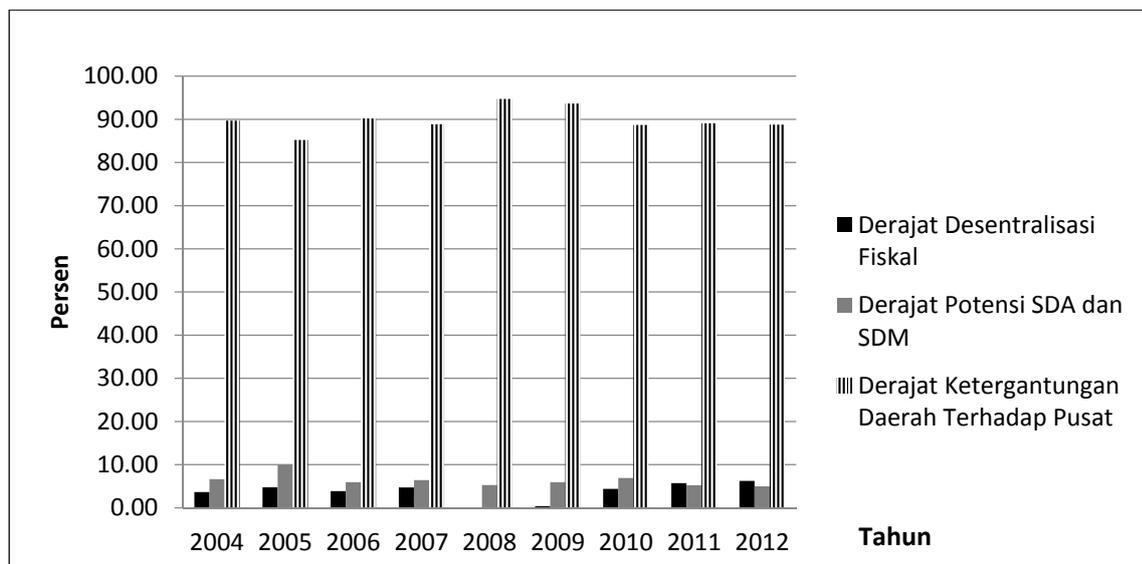
No.	Lapangan usaha	Regional Share	Differensial shift	Proporsional shift	Total
1.	Pertanian	0,334	0,114	-0,107	0,341
2.	Pertambangan	0,334	-0,077	-0,067	0,191
3.	Industri Pengolahan	0,334	0,05	-0,096	0,292
4.	Listrik dan air bersih	0,334	0,121	-0,115	0,340
5.	Bangunan	0,334	-0,091	0,151	0,394
6.	Perdagangan Hotel dan Restoran	0,334	0,098	-0,017	0,414
7.	Pengangkutan dan komunikasi	0,334	-0,085	0,178	0,427
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,334	-0,059	-0,013	0,263
9.	Jasa-Jasa	0,334	-0,080	0,085	0,339

Sumber : BPS 2007 dan 2012 (Data Diolah)

#### KINERJA KEUANGAN DAERAH DITINJAU DARI SISI PENERIMAAN KABUPATEN PASAMAN

Perkembangan derajat desentralisasi fiskal, derajat potensi SDA dan SDM, dan derajat ketergantungan daerah terhadap pusat di Kabupaten Pasaman dapat dikategorikan menurut hasil penelitian Agustina 2010 (Gambar. 4), yaitu derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pasaman selama tahun 2004-2012 masuk dalam kategori sangat rendah, rata-rata nilainya dibawah 10 persen. Pada tahun 2004-2007 berfluktuasi, kemudian sangat rendah pada tahun 2008-2009 yaitu sebesar 0,01 persen dan

0,40 persen, tetapi selama tahun 2010-2012 selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar 4,41 persen, tahun 2011 sebesar 5,71 persen dan tahun 2012 sebesar 6,24 persen. Sumber penerimaan lainnya adalah Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP). Suatu daerah yang mempunyai potensi SDA dan dapat memanfaatkannya dengan optimal, maka daerah tersebut akan dapat meningkatkan penerimaan dari BHPBP, sementara apabila suatu daerah yang tidak mempunyai potensi atau tidak dapat mengoptimalkan sumberdaya alamnya akan semakin tertinggal.



Gambar 4. Persentase Derajat Desentralisasi Fiskal, Derajat Potensi SDA dan SDM, dan Derajat Ketergantungan Daerah Terhadap Pusat di Kabupaten Pasaman Periode 2004-2012

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2012 (Data diolah)

Perkembangan derajat potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Kabupaten Pasaman selama tahun 2004-2012 masuk dalam kategori sangat rendah, rata-rata nilainya dibawah 10 persen. Selama tahun 2004-2009 berfluktuasi, tetapi selama tahun 2010-2012 selalu mengalami penurunan yaitu pada tahun 2010 sebesar 6,89 persen, pada tahun 2011 sebesar 5,25 persen dan pada tahun 2012 sebesar 4,99 persen. Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Pasaman lainnya adalah transfer dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan desentralisasi mengakibatkan semakin besarnya kewenangan yang diberikan kepada daerah baik dalam pengelolaan keuangannya maupun dalam pengembangan daerah.

Adanya perbedaan potensi dan kondisi dari masing-masing daerah, menimbulkan perbedaan kemampuan keuangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Disatu sisi ada daerah yang kaya dan disisi lain ada daerah yang kemampuan keuangannya masih rendah.

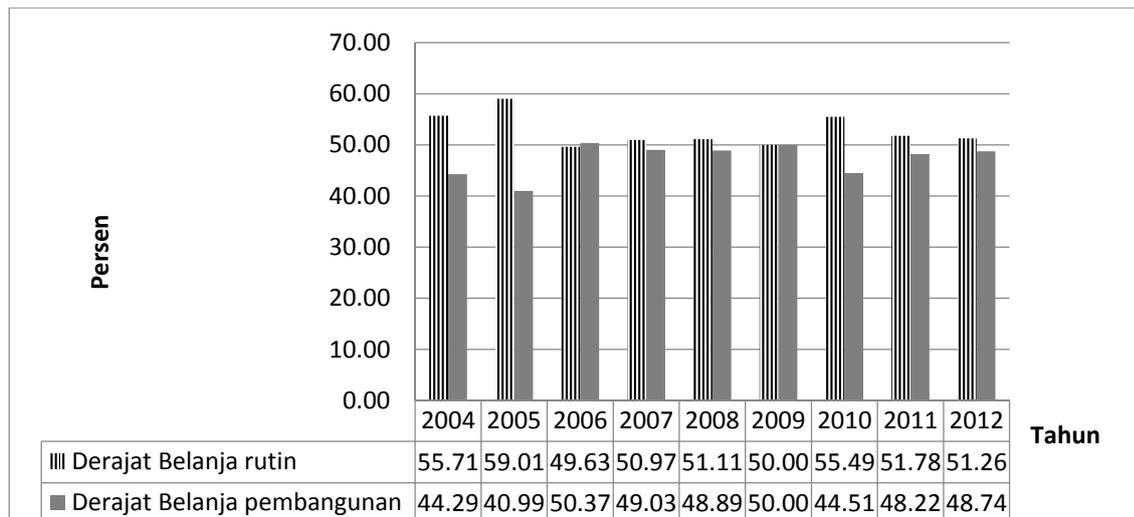
DAU merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan antar-daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bentuk transfer pusat yang bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah, yang menjadi prioritas nasional. Dana ini digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan, peningkatan, serta perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Besarnya kontribusi transfer pusat dalam bentuk DAU dan DAK terhadap penerimaan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat. Derajat ketergantungan daerah Kabupaten Pasaman terhadap pusat yaitu termasuk pada kategori sangat tinggi. Dengan kata lain, Kabupaten Pasaman memiliki tingkat kemandirian fiskal yang masih sangat rendah. Kondisi ini menjelaskan bahwa keuangan daerah Kabupaten pasaman masih bergantung kepada pemberian dana perimbangan. Rata-rata nilai derajat ketergantungan daerah

Kabupaten Pasaman terhadap pusat selama tahun 2004-2012 yaitu berada diatas 85 persen, selama itu nilainya selalu berfluktuasi.

#### **KINERJA KEUANGAN DAERAH DITINJAU DARI SISI PENGELUARAN KABUPATEN PASAMAN**

Alokasi belanja daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Perkembangan derajat belanja rutin Kabupaten Pasaman selama tahun 2004-2012 yaitu berfluktuasi, rata-rata nilainya berada diatas 50 persen yaitu termasuk dalam kategori sangat baik, kecuali pada tahun 2006 senilai 49,63 persen dan tahun 2009 senilai 50,00 persen termasuk dalam kategori baik. Belanja pembangunan merupakan jenis belanja yang menghasilkan nilai tambah aset baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan pada periode tertentu.

Perkembangan derajat belanja pembangunan Kabupaten Pasaman selama tahun 2004-2012 yaitu berfluktuasi, rata-rata nilainya berada diatas 40 persen dan termasuk dalam kategori tinggi, kecuali tahun 2006 yaitu senilai 50,37 dengan kategori sangat tinggi. Kinerja keuangan yang ditinjau dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa kabupaten Pasaman mengalokasikan belanja daerahnya selama tahun 2004-2012 yaitu lebih besar untuk kebutuhan belanja rutin daripada belanja pembangunan. Selaras dengan hasil penelitian Agustina (2010) seluruh kabupaten di Indonesia bahwa Alokasi anggaran belanja rutin lebih besar daripada alokasi anggaran belanja pembangunan. Kondisi ini jika ditinjau dengan analisis ekonomi mengenai perilaku birokrat dalam pemerintahan, sesuai dengan pandangan Weber yang dimodifikasi oleh Niskanen (Mangkoesebroto 1997), yang menyatakan bahwa birokrat sebagaimana juga dengan orang lain adalah pihak yang memaksimalkan kepuasannya melalui gaji, jumlah karyawan, reputasi dan status sosial, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 5.



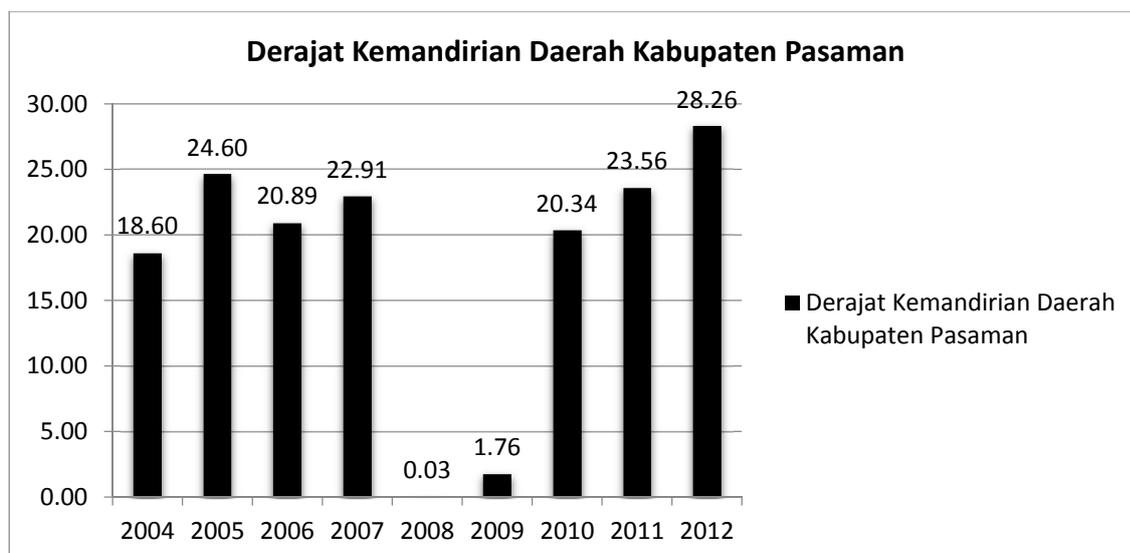
**Gambar 5. Persentase Derajat Belanja Rutin dan Derajat Belanja Pembangunan di Kabupaten Pasaman Periode 2004-2012**

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2012 (Data diolah)

#### DERAJAT KEMANDIRIAN DAERAH

Derajat kemandirian daerah Kabupaten Pasaman selama tahun 2004-2012 rata-rata nilainya berada dibawah 30 persen. Selama tahun 2004-2009 nilainya berfluktuasi, tetapi selama tahun 2010-2012 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sebesar 20,34 persen, tahun 2011 sebesar 23,56 persen dan tahun 2012 sebesar 28,26 persen. Derajat kemandirian daerah Kabupaten Pasaman tahun 2004 yaitu termasuk dalam kategori kurang tinggi, selama tahun

2005-2007 termasuk dalam kategori cukup tinggi, tahun 2007 dan 2008 termasuk pada kategori sangat kurang. Selama tahun 2010-2012 termasuk kedalam kategori cukup tinggi. Secara umum dari semua uraian diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan kinerja keuangan daerah Kabupaten Pasaman selama tahun 2004-2012 masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah belum mampu meningkatkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.



**Gambar 6. Derajat Kemandirian Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2012**

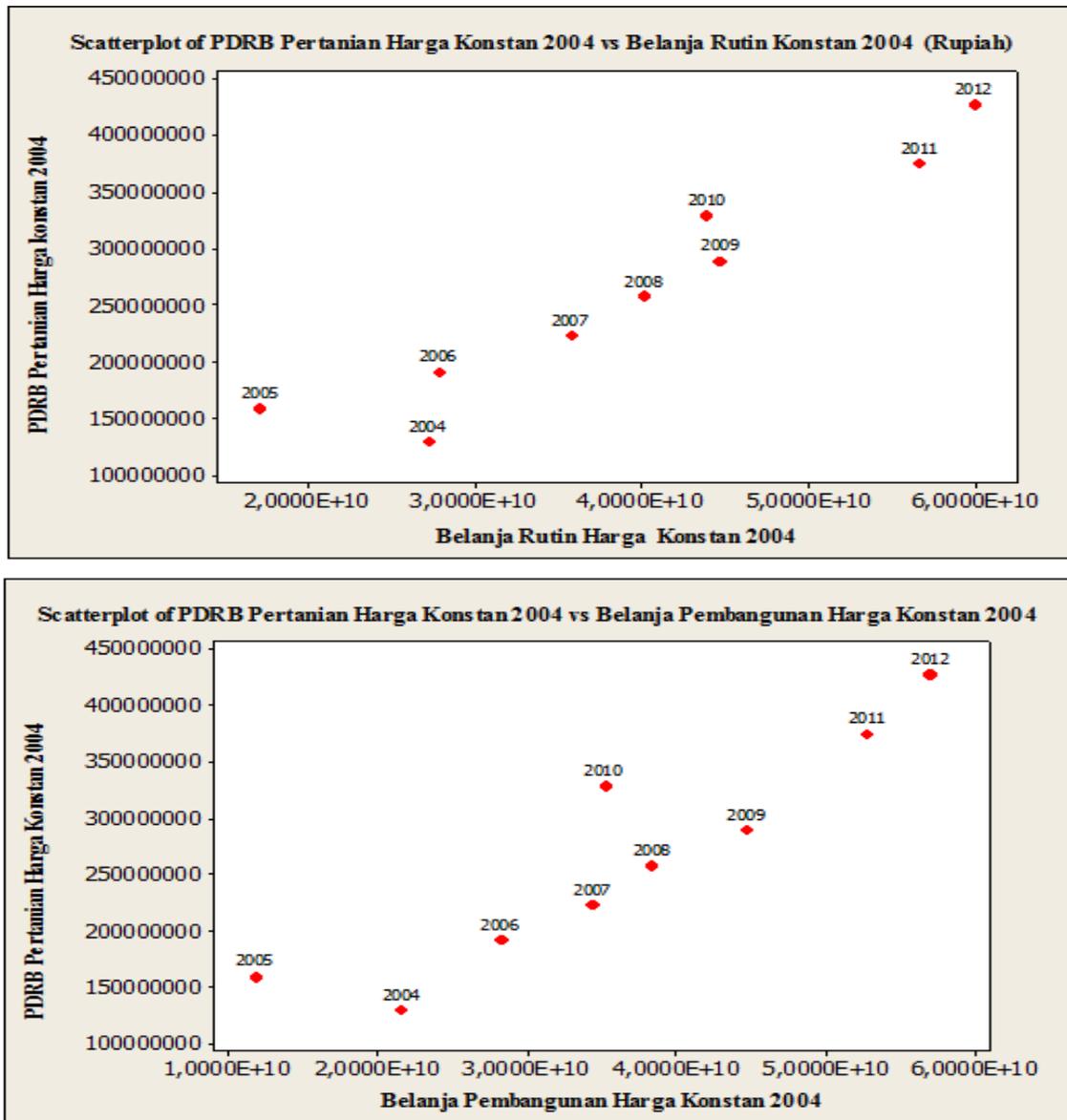
Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2004-2012 (Data diolah)

Kabupaten Pasaman belum mampu untuk membiayai semua kebutuhan belanja daerahnya dengan hanya bersumber dari penerimaan PAD. Hal ini menunjukkan ketergantungan daerah Kabupaten Pasaman terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, sehingga bisa dikatakan salah satu tujuan dari salah satu desentralisasi fiskal belum tercapai dengan optimal. Hal ini disebabkan karena daerah belum mampu menggali dan memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya dengan optimal, sehingga

ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi.

**KETERKAITAN BELANJA DAERAH DENGAN KINERJA SEKTOR PERTANIAN**

Untuk mengetahui belanja daerah yang berpengaruh dalam mendorong kinerja sektor unggulan di wilayah Kabupaten Pasaman, dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi.



**Gambar 7. Scatterplot PDRB Pertanian dengan Belanja Rutin Atas Dasar Harga konstan 2004 dan Scatterplot PDRB Pertanian dengan Belanja Pembangunan Atas Dasar Harga Konstan 2004 Kabupaten Pasaman Selama Tahun 2004-2012**

Sumber : BPS Kabupaten Pasaman (Data diolah)

Dalam analisis korelasi pada penelitian ini diketahui hasilnya menunjukkan hubungan yang positif, dengan interpretasi sebagai berikut: interpretasi hasil korelasi antara PDRB pertanian dengan belanja rutin yaitu berkorelasi tinggi dengan nilai 0.955 dan P-Value sebesar 0.000. Sehingga apabila belanja rutin meningkat maka akan diikuti dengan meningkatnya PDRB pertanian Kabupaten Pasaman, dan jika belanja rutin mengalami penurunan maka PDRB pertanian juga mengalami penurunan. Interpretasi hasil korelasi antara PDRB Pertanian dengan belanja pembangunan yaitu berkorelasi tinggi dengan nilai 0.916 dan P-Value sebesar 0.001. Sehingga apabila belanja pembangunan meningkat maka akan diikuti dengan meningkatnya PDRB pertanian Kabupaten Pasaman, dan jika belanja pembangunan mengalami penurunan maka PDRB pertanian juga mengalami penurunan. Korelasi antara PDRB pertanian dan anggaran belanja daerah Kabupaten Pasaman tergambar pada *scatterplot* (Gambar. 7).

#### **KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH YANG EFEKTIF DALAM MENDORONG KINERJA SEKTOR PERTANIAN WILAYAH KABUPATEN PASAMAN**

Untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pasaman, hendaknya kebijakan pembangunannya diarahkan kepada sektor-sektor yang memiliki keunggulan yang menjadi prioritas pembangunan. Pada penjelasan sebelumnya diketahui bahwa sektor unggulan Kabupaten Pasaman adalah sektor pertanian. Sektor tersebut diharapkan akan lebih mampu berperan dalam meningkatkan kemajuan dan perkembangan daerah. Oleh karena itu diperlukannya anggaran yang cukup dalam pengembangan sektor pertanian tersebut.

Peranan pemerintah daerah sejak dilaksanakannya otonomi daerah semakin dominan, sebagai implikasi dari pemberian kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah. Daerah dituntut untuk dapat mandiri melaksanakan pembangunan, baik sisi perencanaan maupun sisi pe-

laksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Sejalan dengan esensi otonomi daerah, maka besarnya dana yang diterima daerah juga diikuti dengan deskresi yang luas untuk membelanjakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Diharapkan agar anggaran belanja daerah akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi perekonomian di daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat tergantung dari pengelolaan anggaran pendapatan daerah dan pengalokasian belanja daerah terutama pada sektor unggulan daerah.

Pada analisis sebelumnya telah diketahui bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Pasaman belum mampu untuk membiayai semua kebutuhan belanja daerahnya dengan hanya bersumber dari penerimaan PAD, begitu juga dengan Derajat potensi SDA dan SDM daerah Kabupaten Pasaman selama tahun 2010-2012 selalu mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan ketergantungan daerah Kabupaten Pasaman terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, sehingga bisa dikatakan salah satu tujuan dari desentralisasi fiskal belum tercapai dengan optimal. Hal ini disebabkan karena daerah belum mampu menggali dan memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya dengan optimal, sehingga ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi.

Pada analisis korelasi sebelumnya antara PDRB sektor pertanian dengan anggaran pengeluaran daerah Kabupaten Pasaman, diketahui bahwa anggaran belanja pemerintah Kabupaten Pasaman memiliki keterkaitan yang positif dengan kinerja sektor pertanian. Sehingga semakin tinggi belanja daerah Kabupaten Pasaman maka akan semakin tinggi pula PDRB Pertanian Kabupaten Pasaman begitupun sebaliknya.

Dari hasil analisis sebelumnya diketahui bahwa derajat belanja rutin Kabupaten Pasaman lebih besar daripada derajat belanja Pembangunannya, begitupun dengan belanja rutin sektor pertanian lebih besar daripada

belanja pembangunan. Belanja rutin merupakan belanja yang bersifat konsumtif sedangkan belanja pembangunan merupakan belanja yang bersifat investasi. Pada anggaran belanja sektor pertanian pos yang paling besar juga terdapat pada pos belanja rutin dibandingkan dengan pos anggaran belanja pembangunan.

Langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam mengelola keuangan daerahnya dengan baik dalam mendorong kinerja sektor pertanian yaitu dengan:

1. meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan cara mengelola dengan tepat potensi SDA dan SDM yang ada di Kabupaten Pasaman.
2. meningkatkan proporsi untuk belanja pembangunan, terutama pada pos anggaran belanja pembangunan sektor pertanian.

Untuk tindakan strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman adalah pemerintah Kabupaten Pasaman harus lebih tepat sasaran dalam mengalokasikan belanja daerah, karena alokasi untuk belanja pembangunan lebih kecil dibandingkan dengan belanja rutin. Sebagaimana diketahui bahwa belanja pembangunan merupakan belanja yang bersifat investasi, sedangkan belanja rutin lebih bersifat konsumtif. Pos belanja pembangunan sektor pertanian terbesar adalah untuk program pengembangan budidaya perikanan. Sedangkan subsektor yang berkontribusi besar pada PDRB pertanian yaitu subsektor tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk meningkatkan proporsi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman juga harus meningkatkan pendapatan daerah. Khususnya Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebalik-

nya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Penelitian ini menyatakan bahwa dari analisis LQ yang telah dilakukan maka diketahui sektor unggulan di Kabupaten Pasaman yaitu sektor Pertanian dengan nilai LQ >1. Nilai LQ dari tahun 2004-2012 cenderung meningkat nilai LQ pada sektor pertanian yaitu sebesar 2,08 pada tahun 2004 dan 2,30 pada tahun 2012. Hal tersebut karena didukung oleh luas lahan pertanian Kabupaten Pasaman yang berada pada urutan ketiga di Sumatera Barat, yaitu sebesar 9,37% dari luas lahan pertanian keseluruhan di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil analisis shift share pada tahun 2004-2012 laju pertumbuhan sektor pertanian dengan sektor listrik dan air bersih mempunyai tingkat kompetitif lebih besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya yang ada di Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa derajat desentralisasi fiskal, dan derajat potensi SDA dan SDM Kabupaten Pasaman selama tahun 2004-2012 termasuk dalam kategori kurang tinggi, sedangkan derajat ketergantungan terhadap pusat termasuk dalam kategori sangat tinggi. Perkembangan derajat belanja rutin Kabupaten Pasaman selama tahun 2004-2012 yaitu berfluktuasi, rata-rata nilainya berada di atas 50 persen yaitu termasuk dalam kategori sangat tinggi, kecuali pada tahun 2006 senilai 49,63 persen dan tahun 2009 senilai 50,00 persen termasuk dalam kategori baik. Kemudian perkembangan derajat belanja pembangunan Kabupaten Pasaman selama tahun 2004-2012 yaitu berfluktuasi, rata-rata nilainya berada di atas 40 persen dan termasuk dalam kategori tinggi, kecuali tahun 2006

yaitu senilai 50,37 dengan kategori sangat tinggi.

Berdasarkan hasil analisis korelasi dapat diinterpretasikan bahwa korelasi antara PDRB Pertanian dengan belanja rutin dan PDRB pertanian dengan belanja pembangunan Kabupaten Pasaman interpretasi hasil korelasinya adalah tinggi. Korelasi antara PDRB pertanian dengan belanja rutin sebesar 0,955 dengan P-Value 0,000 dan hasil analisis korelasi antara PDRB pertanian dengan belanja pembangunan yaitu sebesar 0,916 dengan P-Value 0,001. Berarti anggaran belanja pemerintah Kabupaten Pasaman memiliki keterkaitan yang positif dengan kinerja sektor pertanian. Sehingga semakin tinggi belanja Pembangunan maka akan semakin tinggi pula PDRB Pertanian Kabupaten Pasaman begitupun sebaliknya.

Langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten pasaman dalam mengelola keuangan daerahnya dengan baik dalam mendorong kinerja sektor pertanian yaitu dengan meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan cara mengelola dengan tepat potensi SDA dan SDM yang ada di kabupaten pasaman dan meningkatkan proporsi untuk belanja pembangunan, terutama pada pos anggaran belanja pembangunan sektor pertanian.

Dalam menyusun anggaran kebijakan perlu memperhatikan sektor-sektor yang merupakan komoditi unggulan dan lebih memprioritaskan pengembangan komoditi unggulan tersebut agar kinerja pembangunan menjadi lebih baik. Selain memperhatikan sektor unggulan, pemerintah Kabupaten Pasaman juga harus memperhatikan sektor-sektor pendukung dalam meningkatkan produktifitas kinerja sektor pertanian. Pemerintah daerah hendaknya lebih memperhatikan kajian-kajian tentang aspek-aspek penganggaran yang sudah dilakukan oleh kalangan akademis untuk optimalisasi penganggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina N. 2010. Desentralisasi Fiskal, Tax Effort, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Studi Empirik Kabupaten/ Kota Se-Indonesia 2001-2008 [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Darise N. 2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU. Jakarta (ID).
- Departemen Pertanian. 2009. Kebijakan PEMDA dalam Alokasi Anggaran dan penyusunan PERDA untuk mengakselerasi Pembangunan pertanian. Jakarta (ID).
- Lind DA, Marchal WG, Wathen SA. 2008. Teknik-teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global. Buku 2. Edisi 13. Sungkono C, Penerjemah; Citra SD, Editor. Jakarta (ID): Penerbit Salemba Empat.
- Mangkoesoebroto G. 1997. Ekonomi Publik. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Miyarto, Widyarti, Sugiyanto. 1993. Studi Antar Sektor Ekonomi Dalam Kaitannya Dengan Usaha Peningkatan Kesempatan Kerja di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Perguruan Tinggi. Buku III Bidang Hukum dan Ekonomi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Panuju DR, Rustiadi E. 2012. Teknik Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah. Bogor (ID). IPB.
- Rustiadi *et al.* 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Bogor (ID). IPB.
- Suparmoko M. 2000. Keuangan Daerah dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE.
- Tarigan R. 2006. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta (ID).
- Todaro M. 1989. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta (ID). Erlangga.
- Wijayanto A. 2008. Analisis Korelasi Product Moment Pearson. Semarang (ID). [Teaching ResourceUNDIP].

- Yuspiar I. 2014. Metode Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Bandung (ID). Program Doktor Manajemen Bisnis Universitas Padjajaran.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2004. Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2004. Kabupaten Pasaman (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2005. Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2005. Kabupaten Pasaman (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2006. Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2006. Kabupaten Pasaman (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2007. Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2007. Kabupaten Pasaman (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008. Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2009. Kabupaten Pasaman (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2010. Kabupaten Pasaman (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2011. Kabupaten Pasaman (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2012. Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2012. Kabupaten Pasaman (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2004. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2004. Provinsi Sumatera Barat (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2005. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2005. Provinsi Sumatera Barat (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2006. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2006. Provinsi Sumatera Barat (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2007. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2007. Provinsi Sumatera Barat (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2008. Provinsi Sumatera Barat (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2009. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2009. Provinsi Sumatera Barat (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2010. Provinsi Sumatera Barat (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2011. Provinsi Sumatera Barat (ID).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2012. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2012. Provinsi Sumatera Barat (ID).

